p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman
JIPKIS
Vol. 6, No. 2, Agustus, 2026 hal. 458-466
Journal Page is available to https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home

ANALISIS KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA BOS: PROPORSI BELANJA HONOR, SARANA, DAN PEMBELAJARAN PADA SMP NEGERI

Supatmin[1], Dina Novita[2]
[1,2]Universitas Pamulang
Email: dosen01767@unpam.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sumber dana operasional utama SMP negeri, tetapi bukti terbuka tentang porsi yang dipakai untuk honor, sarana, dan pembelajaran masih terbatas. Rencana awal memakai data penggunaan BOS per sekolah dari portal JAGA tidak dapat dilaksanakan karena portal tersebut tidak dapat diakses secara otomatis, sehingga analisis bergeser ke sumber terbuka lain. **Tujuan:** Menggambarkan komposisi penggunaan dana BOS jenjang SMP menurut komponen dan mengelompokkannya menjadi belanja honor, sarana, pembelajaran, dan operasional lain. **Metode:** Analisis deskriptif data sekunder berlapis: (1) penggunaan BOS SMP nasional triwulan II 2019 menurut sebelas komponen (Rp916,30 miliar; laporan Kemendikbud), (2) realisasi BOS Reguler 43 SMP di Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 menurut klasifikasi ekonomi (studi terpublikasi), dan (3) laporan rekapitulasi realisasi (K7) satu SMP negeri, SMPN 11 Banjarbaru, tahun 2023. Komponen dikelompokkan dengan aturan yang ditetapkan sebelum perhitungan, disertai analisis sensitivitas untuk komponen perpustakaan. **Hasil:** Pada data nasional 2019, honor menyerap 14,1%, sarana 14,8%, pembelajaran 49,2%, dan operasional lain 21,9%; komponen terbesar adalah pengembangan perpustakaan (24,1%). Di SMPN 11 Banjarbaru 2023, honor 23,4%, sarana 22,8%, pembelajaran 28,6%, dan operasional lain 25,2%, dengan penyerapan 99,9%. Di Maros 2020, belanja pegawai (honor) mencapai 33,0% dan belanja modal 19,0%. Bila perpustakaan dihitung sebagai sarana, porsi sarana naik menjadi 38,9% (nasional) dan 35,1% (Banjarbaru), dan porsi pembelajaran turun menjadi 25,1% dan 16,4%. **Kesimpulan:** Porsi honor pada data yang lebih baru (23–33%) lebih tinggi daripada data nasional 2019 (14%), sejalan dengan pelonggaran batas honor dari 15% menjadi 50% sejak 2020, tetapi masih di bawah batas tersebut. Besarnya porsi pembelajaran sangat bergantung pada cara komponen perpustakaan diklasifikasikan. Karena data hanya mencakup satu periode nasional, satu kabupaten, dan satu sekolah, temuan bersifat indikatif dan perlu diuji ulang dengan data ARKAS atau JAGA per sekolah.

Kata kunci: dana BOS; komposisi belanja; honor; sarana prasarana; pembelajaran; SMP negeri; keuangan pendidikan

ABSTRACT

Background: The School Operational Assistance (BOS) grant is the main operating fund of Indonesian public junior secondary schools, yet open evidence on how much goes to honoraria, facilities, and learning is scarce. The planned school-level data from the JAGA portal could not be accessed, so the analysis used other open sources. **Objective:** To describe the composition of BOS spending in junior secondary schools (SMP) by component, grouped into honoraria, facilities, learning, and other operations. **Methods:** Descriptive analysis of three layers of secondary data: national SMP BOS use in the second quarter of 2019 by eleven components (IDR 916.30 billion), the 2020 realisation of 43 SMPs in Maros Regency by economic

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

classification, and the 2023 realisation report of one public SMP in Banjarbaru. Grouping rules were fixed before calculation, with a sensitivity analysis for library spending. **Results:** Nationally (2019), honoraria took 14.1%, facilities 14.8%, learning 49.2%, and other operations 21.9%. In the Banjarbaru school (2023) the shares were 23.4%, 22.8%, 28.6%, and 25.2%. In Maros (2020) personnel spending reached 33.0%. Counting library spending as facilities raised the facility share to 38.9% and 35.1%. **Conclusion:** Honorarium shares in the more recent data (23–33%) exceed the 2019 national share (14%), consistent with the cap being raised from 15% to 50% in 2020, but remain below the cap. The learning share depends heavily on how library spending is classified. Findings are indicative and should be replicated with school-level ARKAS or JAGA data.
Keywords: BOS grant; school spending composition; honoraria; school facilities; learning expenditure; public junior secondary school; education finance

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah transfer dana per peserta didik dari pemerintah pusat ke sekolah yang telah berjalan sejak 2005. Kajian Bank Dunia menyebut BOS sebagai sumber utama dana diskresioner sekolah: pada 2010, BOS mencakup sekitar 83% dari seluruh dana diskresioner yang diterima sekolah dasar (World Bank, 2014). Evaluasi dampak di Indonesia menemukan bahwa BOS berkaitan dengan nilai ujian yang lebih baik (Sulistyaningrum, 2016; Kurniawan & Rakhmawati, 2022), tetapi dampaknya terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga terbatas (Kurniawan & Rakhmawati, 2022). Pertanyaan yang belum banyak dijawab adalah untuk apa dana itu dibelanjakan di tingkat sekolah.

Pertanyaan ini penting karena literatur pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa besarnya dana tidak cukup menjelaskan hasil belajar; komposisi dan cara pemakaiannya ikut menentukan. Telaah Hanushek (2003) mendapati bahwa kebijakan yang hanya menambah input sering tidak meningkatkan prestasi, sedangkan studi reformasi pembiayaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tambahan belanja dapat memperbaiki capaian bila dibelanjakan untuk input yang bermakna (Jackson dkk., 2016; Lafortune dkk., 2018). Di negara berkembang, hibah sekolah untuk bahan ajar dapat kehilangan dampaknya bila rumah tangga mengurangi pengeluaran mereka sendiri (Das dkk., 2013), dan hibah input baru efektif bila disertai insentif yang tepat (Mbiti dkk., 2019). Telaah Glewwe dan Muralidharan (2016) menyimpulkan bahwa belanja yang menyasar proses pembelajaran cenderung lebih efektif daripada penambahan input umum.

Di Indonesia, pos honor mendapat perhatian khusus. Kajian Bank Dunia memperkirakan sekitar separuh dana BOS pernah dipakai untuk mengangkat guru non-PNS (World Bank, 2014), dan reformasi guru Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan guru honorer berkaitan erat dengan ketersediaan dana di sekolah (Chang dkk., 2014). Bukti eksperimen juga menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan guru tanpa syarat tidak otomatis meningkatkan hasil belajar siswa (de Ree dkk., 2018). Aturan pemakaian BOS untuk honor sendiri berubah: sebelum 2020 porsinya dibatasi paling banyak 15%, lalu sejak 2020 dilonggarkan menjadi paling banyak 50% (CNN Indonesia, 2020), dan batas 50% itu dipertahankan dalam petunjuk teknis BOSP 2022 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek], 2022).

Penelitian BOS di Indonesia sebagian besar berupa studi kasus kualitatif tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di satu sekolah (Nurrochman dkk., 2023; Turambi dkk., 2024). Studi ini umumnya menilai kepatuhan terhadap petunjuk teknis, bukan proporsi belanja. Telaah kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menyoroti sisa dana dan anomali penyerapan, misalnya 18.037

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v6i2.276

SMP yang melaporkan sisa dana BOS pada 2020 (Perdana dkk., 2022), tetapi tidak menyajikan komposisi belanja per komponen. Sementara itu, akuntabilitas belanja publik bergantung pada informasi yang dapat dilihat publik (Reinikka & Svensson, 2004), dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah juga membutuhkan informasi belanja yang terbuka (Pradhan dkk., 2014).

Artikel ini bertujuan (1) menggambarkan komposisi penggunaan dana BOS jenjang SMP menurut komponen pada data nasional yang terbuka; (2) mengelompokkan komponen menjadi belanja honor, sarana, pembelajaran, dan operasional lain; (3) membandingkannya dengan data kabupaten dan satu SMP negeri yang lebih baru; dan (4) menilai seberapa peka kesimpulan terhadap cara pengelompokan komponen.

METODE

Desain. Penelitian ini adalah studi deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang terbuka. Unit analisis adalah agregat penggunaan dana (nasional, kabupaten, dan sekolah). Tidak ada data individu, sehingga persetujuan etik tidak diperlukan.

Penyimpangan dari rencana. Rencana awal adalah mengunduh laporan penggunaan BOS per SMP negeri dari portal JAGA (jaga.id) beserta jumlah dana diterima, jenjang, dan kabupaten, lalu menganalisis sebaran proporsi belanja antarsekolah. Rencana ini tidak dapat dilaksanakan: portal JAGA menolak akses otomatis (robots.txt), dan laman BOS Kemendikbud serta Dapodik tidak dapat dijangkau dari lingkungan pengolahan data penelitian ini. Penelusuran laporan K7 yang dipublikasikan di laman sekolah menghasilkan sedikit dokumen yang dapat dibaca. Karena itu analisis diubah menjadi tiga lapis data yang tersedia terbuka (Tabel 1). Akibatnya, sebaran antarsekolah SMP negeri tidak dapat diestimasi, dan data nasional mencakup SMP negeri dan swasta.

Sumber data. Lapis 1 adalah rekapitulasi komponen penggunaan dana BOS jenjang SMP triwulan II 2019 dalam Kabar BOS Edisi III (Tim Publikasi BOS, 2019), berdasarkan data per 27 Agustus 2019. Pada tanggal itu, 8.678 dari 38.774 SMP (22,4%) telah melapor. Lapis 2 adalah realisasi BOS Reguler 43 SMP di Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 menurut klasifikasi belanja ekonomi (Tikollah dkk., 2021), yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Lapis 3 adalah Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP tahun 2023 (format K7) SMPN 11 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipublikasikan di laman resmi sekolah (SMP Negeri 11 Banjarbaru, 2024). Laporan ini memuat realisasi menurut 12 komponen sesuai Pasal 39 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.

Tabel 1. Sumber data penelitian

Lapis	Cakupan	Periode	Rincian	Sumber
1. Nasional	SMP negeri dan swasta yang melapor (8.678 sekolah)	Triwulan II 2019	11 komponen penggunaan	Tim Publikasi BOS (2019)
2. Kabupaten	43 SMP penerima BOS Reguler, Kab. Maros	TA 2020	7 jenis belanja ekonomi	Tikollah dkk. (2021)
3. Sekolah	SMPN 11 Banjarbaru (negeri)	1 Jan–31 Des 2023	12 komponen (K7)	SMP Negeri 11 Banjarbaru (2024)

Dokumen yang dikeluarkan. Tiga dokumen sekolah lain ditemukan tetapi tidak dipakai. Laporan K7a SMPN 24 Malang (Januari–April 2021) memuat angka, tetapi teks PDF tidak memungkinkan

CC BY NC SA

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

pencocokan angka dengan judul kolom komponen secara andal. Rincian BOS 2024 SMPN 2 Pabelan hanya memuat klasifikasi ekonomi dan tidak menyatakan apakah angka itu anggaran atau realisasi. Data SMPN 1 Anggana 2024 (Ratnawati dkk., 2025) hanya dirinci menurut standar nasional pendidikan, bukan menurut komponen penggunaan.

Definisi operasional dan pengelompokan. Aturan pengelompokan ditetapkan sebelum perhitungan. Honor adalah komponen pembayaran honor. Sarana adalah pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana sekolah ditambah pembelian/penyediaan alat multimedia pembelajaran. Pembelajaran adalah pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta evaluasi/asesmen pembelajaran. Operasional lain adalah penerimaan peserta didik baru, pengelolaan/administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, serta biaya lainnya. Perpustakaan dimasukkan ke pembelajaran karena sebagian besar belanjanya adalah buku teks dan buku bacaan, tetapi komponen ini juga dapat mencakup perabot dan rak, sehingga dilakukan analisis sensitivitas dengan memindahkan perpustakaan ke kelompok sarana. Data Maros tidak dirinci menurut komponen, sehingga hanya belanja pegawai yang dipakai sebagai proksi honor dan belanja modal (peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya) sebagai proksi pengadaan sarana; data Maros tidak dipetakan ke empat kelompok.

Analisis. Proporsi setiap komponen dihitung sebagai nilai komponen dibagi total belanja periode yang sama, dalam persen dengan dua desimal. Pada lapis 3, konsistensi laporan diperiksa dengan identitas saldo awal + penerimaan − belanja = saldo akhir, dan penyerapan dihitung sebagai belanja dibagi dana tersedia. Porsi honor dibandingkan dengan batas regulasi yang berlaku pada periode masing-masing. Karena data berupa agregat dari tiga konteks yang berbeda, tidak dilakukan uji statistik inferensial; perbandingan antarlapis bersifat deskriptif. Seluruh perhitungan dilakukan dengan Python 3 (pandas).

Keterbatasan desain. Pertama, data nasional hanya mencakup satu triwulan dan sekolah yang sudah melapor (22,4%), serta menggabungkan sekolah negeri dan swasta. Kedua, lapis 2 memakai klasifikasi ekonomi yang tidak dapat dipetakan sempurna ke komponen penggunaan. Ketiga, lapis 3 hanya satu sekolah. Keempat, komponen dan batas honor berubah antara 2019 dan 2023, sehingga perbedaan antarlapis dapat mencerminkan perubahan aturan, perbedaan waktu, dan perbedaan wilayah sekaligus.

HASIL

Komposisi nasional 2019. Pada triwulan II 2019, penggunaan dana BOS jenjang SMP yang dilaporkan berjumlah Rp916,30 miliar (Tabel 2). Komponen terbesar adalah pengembangan perpustakaan (Rp220,80 miliar; 24,10%), disusul evaluasi pembelajaran (15,26%), pembayaran honor (14,14%), dan pengelolaan sekolah (13,84%). Pemeliharaan sarana dan prasarana menyerap 9,59% dan alat multimedia 5,17%. Setelah dikelompokkan, pembelajaran menyerap 49,21%, operasional lain 21,89%, sarana 14,76%, dan honor 14,14% (Gambar 1). Porsi honor 14,14% berada tepat di bawah batas 15% yang berlaku saat itu.

Tabel 2. Komposisi penggunaan dana BOS menurut komponen

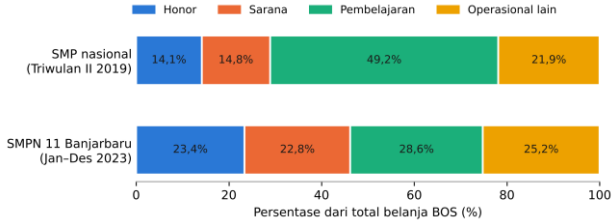
Komponen (kelompok)	Nasional SMP TW II 2019 (Rp miliar)	%	SMPN 11 Banjarbaru 2023 (Rp juta)	%
Pembayaran honor (H)	129,54	14,14	212,40	23,38
Pemeliharaan sarana dan prasarana (S)	87,88	9,59	91,95	10,12
Alat	47,37	5,1	115,29	12,

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v6i2.276

multimedia pembelajaran (S)		7		69
Pengembangan perpustakaan (P)	220,80	24,10	111,17	12,24
Pembelajaran dan ekstrakurikuler (P)	90,29	9,85	126,86	13,97
Evaluasi/asesmen pembelajaran (P)	139,85	15,26	21,79	2,40
Pengelolaan/administrasi sekolah (O)	126,77	13,84	103,72	11,42
Langganan daya dan jasa (O)	43,59	4,76	67,07	7,38
Pengembangan profesi GTK (O)	17,70	1,93	42,35	4,66
Penerimaan peserta didik baru (O)	12,47	1,36	15,75	1,73
Biaya lainnya (O)	0,04	0,00	–	–
Total	**916,30**	**100,00**	**908,35**	**100,00**

Keterangan: H = honor; S = sarana; P = pembelajaran; O = operasional lain. Komponen SMK (peningkatan kompetensi keahlian dan keterserapan lulusan) bernilai nol pada SMPN 11 Banjarbaru dan tidak ditampilkan. Persentase dihitung penulis. Sumber: Tim Publikasi BOS (2019); SMP Negeri 11 Banjarbaru (2024).

Komposisi satu SMP negeri 2023. SMPN 11 Banjarbaru membelanjakan Rp908,35 juta pada 2023 dari dana tersedia Rp909,65 juta (saldo awal Rp11,53 juta dan penerimaan Rp898,12 juta), sehingga sisa dana Rp1,30 juta dan penyerapan 99,86%. Identitas saldo pada laporan konsisten. Komponen terbesar adalah pembayaran honor (23,38%), disusul pembelajaran dan ekstrakurikuler (13,97%), alat multimedia (12,69%), dan perpustakaan (12,24%). Setelah dikelompokkan, pembelajaran menyerap 28,60%, operasional lain 25,20%, honor 23,38%, dan sarana 22,81% (Gambar 1). Porsi honor kurang dari separuh batas 50% yang berlaku.



Gambar 1. Komposisi belanja BOS menurut kelompok pada data nasional 2019 dan satu SMP negeri 2023

Sumber: Tim Publikasi BOS (2019); SMP Negeri 11 Banjarbaru (2024); diolah penulis. Data nasional mencakup SMP negeri dan swasta yang telah melapor.

Komposisi kabupaten 2020. Realisasi BOS Reguler 43 SMP di Kabupaten Maros pada 2020 berjumlah Rp5,56 miliar (Tabel 3). Belanja pegawai, yang menurut sumber berupa honor guru dan tenaga kependidikan honorer, menyerap 32,97%, porsi terbesar di antara jenis belanja. Belanja modal (peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya) menyerap 18,98% dan belanja pemeliharaan 10,47%. Sebaran antarsekolah lebar: porsi belanja barang dan jasa berkisar dari 31–40% sampai 91–100%, dan 7 dari 43 sekolah (16%) membelanjakan lebih dari separuh dananya untuk belanja modal (Tikollah dkk., 2021).

Tabel 3. Realisasi BOS Reguler 43 SMP di Kabupaten Maros menurut jenis belanja, 2020

Jenis belanja	Realisasi (Rp juta)	%
Belanja pegawai (proksi honor)	1.834,13	32,97
Belanja barang persediaan	1.306,12	23,48
Belanja peralatan dan mesin (modal)	645,66	11,61
Belanja pemeliharaan	582,48	10,47
Belanja jasa	524,78	9,43
Belanja aset tetap lainnya (modal)	410,23	7,37

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Belanja perjalanan dinas	259,35	4,66
Total	**5.562,74**	**100,00**

Sumber: Tikollah dkk. (2021), dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Maros; persentase dihitung ulang penulis dengan dua desimal.

Perbandingan porsi honor. Porsi honor meningkat dari 14,14% pada data nasional 2019 menjadi 32,97% di Maros 2020 dan 23,38% di SMPN 11 Banjarbaru 2023. Kedua angka setelah 2019 berada di atas batas lama 15% tetapi di bawah batas baru 50%.

Analisis sensitivitas. Bila pengembangan perpustakaan dipindahkan ke kelompok sarana, porsi sarana naik dari 14,76% menjadi 38,86% pada data nasional dan dari 22,81% menjadi 35,05% di SMPN 11 Banjarbaru, sedangkan porsi pembelajaran turun dari 49,21% menjadi 25,12% dan dari 28,60% menjadi 16,36% (Tabel 4). Urutan kelompok pada data nasional berubah: pembelajaran tidak lagi menjadi kelompok terbesar. Porsi honor tidak terpengaruh.

Tabel 4. Porsi kelompok belanja menurut dua aturan pengelompokan (%)

Kelompok	Nasional 2019: utama	Nasional 2019: sensitivitas	Banjarbaru 2023: utama	Banjarbaru 2023: sensitivitas
Honor	14,14	14,14	23,38	23,38
Sarana	14,76	38,86	22,81	35,05
Pembelajaran	49,21	25,12	28,60	16,36
Operasional lain	21,89	21,89	25,20	25,20

Keterangan: aturan utama memasukkan pengembangan perpustakaan ke pembelajaran; aturan sensitivitas memasukkannya ke sarana.

PEMBAHASAN

Porsi honor naik setelah batas dilonggarkan, tetapi belum mendekati batas. Porsi honor pada data nasional 2019 (14,14%) hampir sama dengan batas 15% saat itu, yang menunjukkan bahwa batas tersebut kemungkinan mengikat bagi banyak sekolah. Pada data setelah pelonggaran, porsi honor naik menjadi 23–33%. Pola ini sejalan dengan perkiraan bahwa sebagian besar dana BOS dipakai untuk guru non-PNS ketika aturan mengizinkan (World Bank, 2014) dan dengan ketergantungan sekolah pada guru honorer yang dibiayai dari dana sekolah (Chang dkk., 2014). Namun, karena data setelah 2019 hanya berasal dari satu kabupaten dan satu sekolah, kenaikan ini belum dapat dianggap sebagai tren nasional. Bukti bahwa kenaikan penghasilan guru tanpa syarat tidak meningkatkan hasil belajar (de Ree dkk., 2018) mengingatkan bahwa porsi honor yang tinggi tidak dengan sendirinya baik atau buruk; yang menentukan adalah apakah honor itu membiayai guru yang benar-benar dibutuhkan di kelas.

Porsi pembelajaran bergantung pada klasifikasi. Pada data nasional, pembelajaran tampak menyerap hampir separuh dana, tetapi seperempat di antaranya adalah perpustakaan, yang sebagian besar berupa pengadaan buku. Bila perpustakaan dianggap sarana, porsi pembelajaran turun menjadi sekitar seperempat. Pembacaan ini penting karena literatur membedakan input fisik dari belanja yang langsung mengubah proses belajar: hibah bahan ajar dapat diimbangi oleh berkurangnya belanja rumah tangga (Das dkk., 2013), dan input baru berdampak lebih besar bila dipadukan dengan insentif atau perubahan praktik mengajar (Mbiti dkk., 2019; Glewwe & Muralidharan, 2016). Laporan komposisi BOS yang hanya menjumlahkan komponen menurut nama karena itu dapat melebih-lebihkan porsi belanja yang menyentuh pembelajaran.

Pola musiman dan pergeseran ke sarana digital. Porsi evaluasi pembelajaran yang tinggi pada data nasional (15,26%) kemungkinan dipengaruhi waktu: triwulan II mencakup ujian akhir semester dan ujian akhir jenjang. Data satu triwulan karena itu tidak mewakili komposisi setahun. Di SMPN 11 Banjarbaru, porsi alat multimedia (12,69%) lebih dari dua kali porsi nasional 2019 (5,17%), dan porsi asesmen hanya

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v6i2.276

2,40%. Perbedaan ini konsisten dengan dihapusnya ujian nasional dan meningkatnya kebutuhan perangkat digital setelah 2020, tetapi satu sekolah tidak cukup untuk menyimpulkan pergeseran nasional.

Variasi antarsekolah lebih besar daripada rata-rata. Data Maros menunjukkan sebaran belanja yang lebar antarsekolah dalam satu kabupaten dan satu tahun, dengan 16% sekolah membelanjakan lebih dari separuh dana untuk belanja modal. Rata-rata agregat karena itu dapat menyembunyikan sekolah yang hampir seluruh dananya habis untuk honor atau pengadaan. Temuan ini sejalan dengan studi kasus yang mencatat bahwa alokasi BOS sangat bergantung pada kebutuhan dan keputusan setiap sekolah (Nurrochman dkk., 2023; Turambi dkk., 2024).

Implikasi bagi tata kelola. Pengawasan komposisi belanja BOS sebaiknya tidak berhenti pada kepatuhan terhadap batas honor. Dinas pendidikan dapat memantau porsi honor, sarana, dan pembelajaran per sekolah dari data ARKAS dan membandingkannya antarsekolah sejenis untuk menemukan sekolah dengan pola ekstrem. Kerangka akuntabilitas sekolah juga menekankan bahwa informasi kinerja dan belanja yang terbuka adalah prasyarat agar orang tua dan komite dapat menuntut perbaikan (Bruns dkk., 2011). Publikasi komposisi per sekolah yang mudah dibaca, bukan hanya formulir K7 dalam PDF, juga akan memperkuat pengawasan masyarakat, sesuai temuan bahwa informasi publik mengurangi kebocoran dana transfer (Reinikka & Svensson, 2004) dan bahwa partisipasi komite sekolah yang bermakna membutuhkan informasi (Pradhan dkk., 2014). Bagi peneliti, klasifikasi komponen perpustakaan perlu dinyatakan secara eksplisit karena sangat memengaruhi kesimpulan tentang porsi pembelajaran.

Keterbatasan. Pertama, analisis tidak memakai data per sekolah SMP negeri dari JAGA sebagaimana direncanakan, sehingga judul artikel tentang SMP negeri hanya terwakili langsung oleh satu sekolah; data nasional menggabungkan sekolah negeri dan swasta, dan status sekolah di Maros tidak dinyatakan dalam sumber. Kedua, data nasional hanya satu triwulan dan hanya dari 22,4% sekolah yang telah melapor, sehingga dapat bias bila sekolah yang cepat melapor berbeda polanya. Ketiga, tiga lapis data berasal dari tahun, wilayah, dan aturan yang berbeda, sehingga perbedaan antarlapis tidak dapat dikaitkan pada satu penyebab. Keempat, klasifikasi ekonomi di Maros tidak dapat dipetakan sempurna ke komponen penggunaan. Kelima, pengelompokan honor, sarana, dan pembelajaran adalah keputusan analitis; analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kesimpulan tentang pembelajaran peka terhadap keputusan ini. Penelitian lanjutan sebaiknya memakai data realisasi per sekolah dari ARKAS atau JAGA untuk seluruh SMP negeri di satu atau beberapa provinsi, sehingga sebaran, hubungan dengan jumlah siswa dan lokasi, serta perubahan dari tahun ke tahun dapat dianalisis.

KESIMPULAN

Pada data nasional SMP triwulan II 2019, dana BOS paling banyak dipakai untuk kelompok pembelajaran (49,2%), terutama perpustakaan dan evaluasi, sedangkan honor menyerap 14,1% dan sarana 14,8%. Data yang lebih baru dari satu kabupaten (2020) dan satu SMP negeri (2023) menunjukkan porsi honor yang lebih tinggi, yaitu 33,0% dan 23,4%, di atas batas lama 15% tetapi di bawah batas 50% yang berlaku sejak 2020. Porsi pembelajaran sangat bergantung pada klasifikasi perpustakaan: bila perpustakaan dihitung sebagai sarana, porsi pembelajaran turun menjadi sekitar seperempat (nasional) dan seperenam (SMPN 11 Banjarbaru). Karena keterbatasan data, temuan ini bersifat indikatif dan perlu diuji dengan data realisasi per sekolah dari ARKAS atau JAGA.

DAFTAR PUSTAKA

Bruns, B., Filmer, D., & Patrinos, H. A. (2011). *Making schools work: New evidence on accountability reforms*. World Bank.

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8679-8

Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., de Ree, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9829-6

CNN Indonesia. (2020, February 12). *Dana BOS Rp54,32 T: Untuk honorer, internet, hingga toilet*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212104137-20-473838/dana-bos-rp5432-t-untuk-honorer-internet-hingga-toilet

Das, J., Dercon, S., Habyarimana, J., Krishnan, P., Muralidharan, K., & Sundararaman, V. (2013). School inputs, household substitution, and test scores. *American Economic Journal: Applied Economics, 5*(2), 29–57. https://doi.org/10.1257/app.5.2.29

de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. *The Quarterly Journal of Economics, 133*(2), 993–1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040

Glewwe, P., & Muralidharan, K. (2016). Improving education outcomes in developing countries. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the economics of education* (Vol. 5, pp. 653–743). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63459-7.00010-5

Hanushek, E. A. (2003). The failure of input-based schooling policies. *The Economic Journal, 113*(485), F64–F98. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00099

Jackson, C. K., Johnson, R. C., & Persico, C. (2016). The effects of school spending on educational and economic outcomes: Evidence from school finance reforms. *The Quarterly Journal of Economics, 131*(1), 157–218. https://doi.org/10.1093/qje/qjv036

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. https://pasal.id/en/peraturan/permen/permendikbudristek-no-63-tahun-2022

Kurniawan, R., & Rakhmawati. (2022). The impact of School Operational Assistance (BOS) on student expenditure and scores. *Jurnal Ekonomi Indonesia, 11*(1), 1–11. http://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/download/110/55/823

Lafortune, J., Rothstein, J., & Schanzenbach, D. W. (2018). School finance reform and the distribution of student achievement. *American Economic Journal: Applied Economics, 10*(2), 1–26. https://doi.org/10.1257/app.20160567

Mbiti, I., Muralidharan, K., Romero, M., Schipper, Y., Manda, C., & Rajani, R. (2019). Inputs, incentives, and complementarities in education: Experimental evidence from Tanzania. *The Quarterly Journal of Economics, 134*(3), 1627–1673. https://doi.org/10.1093/qje/qjz010

Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4*(1), 60–70. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331

Perdana, N. S., Oktaria, T., Raziqiin, K., Akadira, T., Nurpadillah, W., Khairunnisa, & Prayitno. (2022). *Mendorong tata kelola dan penyerapan dana BOS lebih optimal* (Risalah Kebijakan No. 3). Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://pskp.kemdikbud.go.id/assets

_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/Risalah_Kebijakan_PSKP_No__3_Juli_2022_Mendorong_Tata_Kelola_dan_Penyerapan_Dana_BOS_Lebih_Optimal.pdf

Pradhan, M., Suryadarma, D., Beatty, A., Wong, M., Gaduh, A., Alisjahbana, A., & Artha, R. P. (2014). Improving educational quality through enhancing community participation: Results from a randomized field experiment in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics, 6*(2), 105–126. https://doi.org/10.1257/app.6.2.105

Ratnawati, E., Rachim, A., Mulawarman, W. G., & Warman. (2025). Analisis makro pembiayaan pendidikan di SMP. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 5*(2), 658–669. https://www.jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/download/4856/3670

Reinikka, R., & Svensson, J. (2004). Local capture: Evidence from a central government transfer program in Uganda. *The Quarterly Journal of Economics, 119*(2), 679–705. https://doi.org/10.1162/0033553041382120

SMP Negeri 11 Banjarbaru. (2024). *Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOSP tahun 2023* [Laporan K7]. https://smpn11banjarbaru.sch.id/wp-content/uploads/2024/03/rpd-k7-output.pdf

Sulistyaningrum, E. (2016). Impact evaluation of the School Operational Assistance Program (BOS) using the matching method. *Journal of Indonesian Economy and Business, 31*(1). https://doi.org/10.22146/jieb.10319

Tikollah, M. R., Hasyim, S. H., & Nuraisyiah. (2021). Analisis penggunaan dana biaya operasional sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros. *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM 2021*. Universitas Negeri Makassar. https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/26434

Tim Publikasi BOS. (2019). *Kabar BOS: Edisi III, Juli 2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://bos.kemdikbud.go.id/media/upload/users/5610fb71841ca54bd90ef3be/files/Laporan%20BOS%20TW%20II%202019.pdf

Turambi, K., Budiarso, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2*(2), 180–197. https://doi.org/10.58784/rapi.150

World Bank. (2014). *Assessing the role of the School Operational Grant Program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia* (Report No. AUS4133). https://documents1.worldbank.org/curated/en/779451468253241136/pdf/AUS4133-REVISED-WP-PUBLIC-Box391467B-BOS-Review-Main-Report-28May2015.pdf